

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan di Indonesia merupakan salah satu komponen dalam sistem perekonomian nasional melalui fungsi intermediasi keuangannya. Sebagai lembaga intermediasi, bank menjalankan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna mendukung aktivitas konsumsi serta investasi (Julianto & Erliani, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, teori intermediasi keuangan oleh Benston dan Smith (1976) memberikan kerangka teoritis bahwa perbankan berperan meminimalkan biaya transaksi dan asimetri informasi dalam mengalokasikan dana masyarakat ke berbagai sektor produktif. Oleh karena itu, stabilitas kinerja perbankan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan nasional. Salah satu indikator utama dalam mengukur efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba adalah profitabilitas, yang secara umum diukur melalui *Return On Assets* (ROA). Rasio ROA merefleksikan tingkat efektivitas manajemen bank dalam memanfaatkan seluruh aset yang dikelola untuk menghasilkan laba bersih, sehingga rasio ini menjadi salah satu parameter utama penilaian kesehatan keuangan lembaga perbankan.

Dalam pelaksanaan fungsi intermediasi tersebut, penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari portofolio perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), portofolio kredit UMKM berkontribusi terhadap pendapatan bunga bank dengan tingkat risiko

yang dimitigasi secara terukur. Sektor UMKM memiliki posisi strategis mengingat kontribusinya mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, kesehatan sektor UMKM berdampak langsung pada stabilitas dan profitabilitas industri perbankan nasional.

Meskipun memiliki kontribusi volume yang besar terhadap PDB, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga perbankan. Hambatan tersebut umumnya mencakup keterbatasan kepemilikan jaminan (*collateral*) yang memenuhi syarat, belum tersedianya laporan keuangan yang terstandardisasi, serta kendala pemenuhan persyaratan administratif perbankan. Kondisi ini diperparah oleh tingkat literasi keuangan yang relatif rendah di kalangan pelaku usaha. Keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan pinjaman formal, tata cara perhitungan suku bunga, hingga termin pengembalian pinjaman terbukti membatasi kapasitas pelaku usaha mikro dalam mengelola serta meminimalkan risiko keuangan operasional mereka (Mayasari et al., 2023).

Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 sebagai salah satu kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha. Program ini merupakan skema pembiayaan dengan dukungan penjaminan kredit dari pemerintah (Hidayah et al., 2024), yang ditargetkan bagi pelaku UMKM kategori produktif namun belum memenuhi persyaratan kelayakan komersial perbankan atau *feasible but not bankable* (Hasanah dan Priantina dalam Sari &

Imaningsih, 2022). Melalui program ini, hambatan pembiayaan ditekan dengan penawaran suku bunga yang disubsidi, persyaratan agunan yang disesuaikan, serta penyederhanaan prosedur administrasi dibandingkan dengan struktur pinjaman komersial konvensional.

Program KUR di Indonesia melibatkan 56 lembaga penyalur resmi yang ditunjuk dan diawasi oleh pemerintah dari tahun 2022 sampai dengan 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Komposisi lembaga tersebut terdiri dari 52 bank, 3 koperasi simpan pinjam, dan 1 pegadaian syariah. Adapun bank-bank penyalur KUR di Indonesia sejak 2022-2024 meliputi:

Tabel 1. 1
Bank Penyalur KUR di Indonesia Tahun 2022-2024

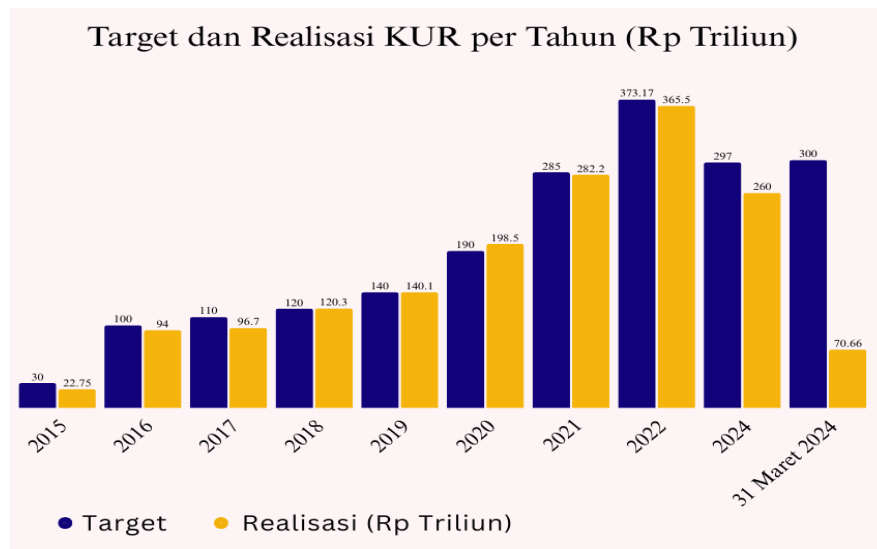
No.	Bank Penyalur KUR	No.	Bank Penyalur KUR
1	BRI	27	BPD Kalsel Syariah
2	Bank Mandiri	28	BPD Kalbar
3	BNI	29	BPD Kalbar Syariah
4	BCA	30	BPD Kaltimara
5	Bank Maybank	31	BPD Kaltimara Syariah
6	BPD Jabar	32	BPD Kalteng
7	OCBC NISP	33	BPD Sulselbar
8	BPD DKI	34	BPD Sulselbar Syariah
9	BPD DKI Syariah	35	BPD SulutGo
10	BPD DIY	36	BPD Bali
11	BPD DIY Syariah	37	BPD Papua

No.	Bank Penyalur KUR	No.	Bank Penyalur KUR
12	BPD Jateng	38	BPD Bengkulu
13	BPD Jateng Syariah	39	BPD Sultra
14	BPD Jatim	40	Bank Sinarmas
15	BPD Jatim Syariah	41	Bank Sinarmas Syariah
16	BPD Jambi	42	BTN
17	BPD Aceh Syariah	43	SMBC
18	BPD Sumut	44	Bank Bukopin
19	BPD Sumbar	45	BJB Syariah
20	BPD Sumbar Syariah	46	Bank Syariah Indonesia
21	BPD Riau Kepri	47	Bank Raya Indonesia
22	BPD Riau Kepri Syariah	48	Nationalnobu
23	BPD Sumsel Babel	49	Bank Ina Perdana
24	BPD Sumsel Babel Syariah	50	Bank Mandiri Taspen
25	BPD Lampung	51	BPR Indra Candra
26	BPD Kalsel	52	BPR Agung Sejahtera

(Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024)

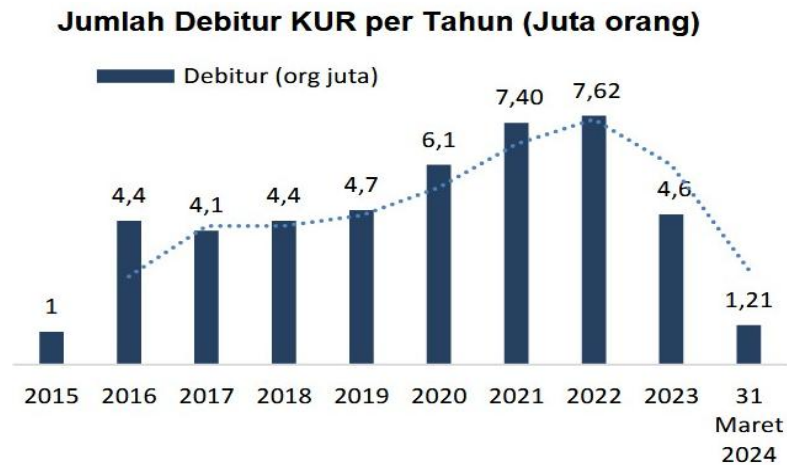
Pelaksanaan program KUR mencatatkan tren peningkatan volume penyaluran sejak awal diluncurkan. Distribusi KUR mengalami pertumbuhan setiap tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1, yang menyajikan grafik perbandingan target dan realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga kuartal pertama 2024 (31 Maret 2024). Pada awal periode tahun 2015, realisasi distribusi KUR tercatat sebesar Rp22,75 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp30 triliun. Realisasi volume penyaluran melampaui target yang ditetapkan terjadi pada tahun 2019, di

mana capaian KUR tercatat sebesar Rp140,1 triliun. Realisasi angka tersebut menunjukkan tingkat penyerapan program dalam perluasan akses pembiayaan bagi segmen UMKM.



Gambar 1. 1
Target dan Realisasi KUR per Tahun
(Sumber : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2024)

Pertumbuhan volume penyaluran KUR tersebut sejalan dengan perkembangan jumlah debiturnya yang tertera pada Gambar 1.2. Jumlah debitur yang pada tahun 2015 tercatat sekitar 1 juta jiwa mengalami peningkatan secara berkala hingga mencapai angka 7,62 juta debitur pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan kuantitas menjadi 4,6 juta debitur pada tahun 2023 akibat proses normalisasi pascapandemi, jumlah tersebut masih berada di atas volume pada tahap awal implementasi program. Memasuki kuartal pertama tahun 2024, tercatat penambahan sebanyak 1,21 juta debitur baru, yang mengindikasikan keberlanjutan perluasan program di masyarakat.



Gambar 1. 2
Jumlah Debitur KUR per Tahun
(Sumber : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2024)

Pada tingkat nasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai penyalur terbesar dengan porsi akumulasi di atas 50% dari total plafon nasional (Fajarihza, 2025). Kontribusi ini menempatkan bank milik negara tersebut sebagai instrumen utama dalam realisasi program pembiayaan pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan program KUR di Provinsi Bali juga menunjukkan pergerakan yang meningkat. Berdasarkan data OJK Provinsi Bali, total penyaluran KUR tahun 2024 mencapai sekitar Rp10,81 triliun, atau naik dari angka Rp8,93 triliun pada tahun 2023 (Wiguna, 2025a). Selain itu, proporsi alokasi kredit oleh perbankan di Bali secara konsisten mengarah ke sektor UMKM dengan porsi di atas 52% dari total portofolio (Wiguna, 2025b). Data ini menunjukkan bahwa sektor produktif merupakan fokus utama alokasi pembiayaan perbankan di Provinsi Bali.

Meskipun realisasi distribusi KUR terus mengalami peningkatan, penelitian yang menguji dampak ekspansi kredit bersubsidi ini terhadap profitabilitas bank penyalur masih terbatas, terutama ketika dihadapkan pada fluktuasi risiko kredit (NPL) dan tantangan efisiensi biaya operasional (BOPO). Sebagian besar studi

terdahulu berfokus pada dampak sosial ekonomi KUR terhadap pemberdayaan pelaku usaha, sedangkan implikasinya terhadap kinerja keuangan internal lembaga penyalur belum banyak dianalisis secara empiris. Peningkatan penyaluran KUR juga berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah yang dapat memengaruhi pendapatan bunga dan tingkat pengembalian aset bank.

Aktivitas pembiayaan melalui skema kredit KUR mengandung risiko kredit yang memerlukan manajemen risiko secara terukur. Risiko ini direfleksikan melalui rasio NPL yang berfungsi sebagai parameter objektif kualitas portofolio kredit perbankan. Berdasarkan teori intermediasi keuangan, bank mengalokasikan dana dari nasabah penyimpan kepada debitur untuk memperoleh pendapatan bunga. Namun, tingginya risiko kredit yang tecermin dari rasio NPL dapat memotong perolehan laba bersih sehingga memberikan tekanan pada ROA. Kategori NPL sendiri ditetapkan pada instrumen kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok atau bunga di atas 90 hari. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban tepat waktu memengaruhi kinerja keuangan entitas bank (Kusuma & Dharma, 2025). Tingkat NPL dipengaruhi oleh faktor internal seperti kecukupan modal, kualitas analisis kelayakan kredit, dan efektivitas distribusi, serta faktor eksternal seperti kapasitas bayar debitur, dinamika makroekonomi, dan tingkat kompetisi pasar. Oleh karena itu, tata kelola risiko kredit merupakan faktor penentu stabilitas jangka panjang program KUR.

Data pemantauan OJK Provinsi Bali menunjukkan bahwa rasio NPL perbankan di Bali pada akhir tahun 2024 berada pada tingkat 2,94% (Wiguna, 2025a). Walaupun posisi tersebut masih berada di bawah batasan maksimal regulasi OJK

yaitu maksimal 5%, indikator ini tetap memerlukan pengawasan dan mitigasi yang terarah. Kondisi ini menegaskan bahwa perluasan program KUR harus diimbangi dengan manajemen kualitas kredit guna mengamankan stabilitas rasio ROA bank. Untuk menganalisis perkembangan indikator risiko tersebut, data historis dari lembaga perbankan penyalur KUR pada periode 2022–2024 disajikan di bawah ini untuk menggambarkan dinamika dan tren NPL pada enam lembaga perbankan sampel:

Tabel 1. 2
Perkembangan NPL Bank Penyalur KUR (%)

Bank Penyalur KUR	Tahun		
	2022	2023	2024
BPD Jawa Barat	0,46	0,75	1,00
BPD DIY	0,69	0,98	1,71
BPD Jawa Timur	1,01	1,21	1,53
SMBC	0,40	0,40	1,10
BTN	1,32	1,32	1,89
BPD Kalimantan Tengah	0,67	1,04	1,61
BSI	0,70	0,71	0,74

(Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Bank tahun 2022-2024, 2026)

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan tren peningkatan rasio NPL secara konsisten pada bank penyalur KUR di Indonesia periode 2022–2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya fluktuasi kualitas aset di tengah ekspansi program pinjaman pemerintah. Secara teoritis, kegagalan pengelolaan keuangan sering dipicu oleh lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol terhadap aliran dana keluar, yang berdampak langsung pada peningkatan rasio NPL (Atmadja et al., 2021). Berdasarkan teori sinyal, tren kenaikan NPL menjadi sinyal negatif bagi pasar dan otoritas pengawas mengenai potensi kendala pada manajemen risiko kredit atau penurunan kapasitas bayar debitur KUR. Penurunan kualitas kredit ini

mengharuskan bank meningkatkan pembentukan cadangan kerugian, sehingga memotong pendapatan operasional dan menekan profitabilitas secara keseluruhan. Pola perkembangan indikator risiko ini bervariasi antar bank sampel. BPD DIY dan BPD Kalteng mencatatkan kenaikan NPL yang relatif tajam. Rasio NPL BPD DIY meningkat hingga mencapai 1,71% pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2024 juga terjadi pada bank komersial seperti Bank SMBC dan Bank BTN, yang menunjukkan bahwa risiko penurunan kualitas kredit bersifat meluas pada lintas skala bank. Secara akademis, fenomena ini dapat dikaitkan dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit pasca pandemi COVID-19. Selama pandemi, restrukturisasi kredit digunakan sebagai bentuk relaksasi untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, sehingga sebagian kredit bermasalah masih dapat dikategorikan sehat secara administratif (Devi et al., 2025). Pasca-berakhirnya kebijakan relaksasi, perbankan wajib melakukan klasifikasi ulang terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Akibatnya, kredit yang sebelumnya terproteksi oleh kebijakan sebelumnya mulai tercatat sebagai pinjaman bermasalah karena kapasitas ekonomi debitur belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, BSI mencatatkan rasio NPL yang relatif stabil di kisaran 0,70%. Tren ini mengindikasikan implementasi manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang efektif dalam seleksi debitur di tengah peningkatan volume distribusi KUR. Keragaman kinerja ini menegaskan bahwa kapabilitas manajemen internal dalam evaluasi kelayakan kredit menjadi faktor penentu kualitas aset selain kondisi makroekonomi. Peningkatan rasio NPL berpotensi menurunkan ROA karena bank harus menanggung biaya pencadangan yang lebih besar. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh NPL dan

penyaluran KUR secara bersamaan terhadap ROA. Hasil pengujian ini diperlukan sebagai dasar evaluasi bagi lembaga penyalur KUR dalam menyelaraskan fungsi intermediasi sosial sektor UMKM dengan pemenuhan kinerja keuangan serta keberlanjutan bisnis perbankan.

Indikator efisiensi operasional bank diukur melalui rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini merefleksikan besaran biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit pendapatan operasional, di mana nilai BOPO yang rendah mencerminkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Dalam kerangka teori sinyal, rasio BOPO yang tinggi menjadi indikasi adanya inefisiensi operasional akibat manajemen biaya internal yang belum optimal. Rasio ini diformulasikan menggunakan data laporan laba rugi, sehingga memiliki konsistensi pengukuran antar-periode. Tingkat BOPO memengaruhi kapasitas bank dalam mengonversi pendapatan bunga menjadi laba bersih. Secara teoretis, perluasan volume penyaluran KUR berpotensi meningkatkan pendapatan bunga. Namun, apabila ekspansi tersebut diikuti oleh lonjakan biaya operasional akibat perluasan jaringan, pengelolaan debitur, atau proses monitoring yang tidak efisien, peningkatan pendapatan tersebut akan terserap oleh biaya, sehingga pertumbuhan ROA tidak proporsional.

Aspek efisiensi operasional menjadi krusial dalam distribusi KUR karena skema program ini menggunakan suku bunga bersubsidi dengan margin keuntungan yang relatif terbatas. Perbankan memerlukan pengendalian biaya yang ketat agar margin yang diperoleh dari KUR tidak tergerus oleh beban operasional. Dampak positif penyaluran KUR terhadap ROA akan termitigasi jika tidak diimbangi dengan efisiensi pengelolaan biaya sebagaimana tecermin dalam rasio

BOPO. Perkembangan rasio BOPO pada beberapa bank penyalur KUR selama periode 2022–2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3
Perkembangan BOPO Bank Penyalur KUR (%)

Bank Penyalur KUR	Tahun		
	2022	2023	2024
BPD Jawa Barat	80,35	85,31	90,20
BPD DIY	69,59	70,74	73,55
BPD Jawa Timur	76,15	77,27	81,89
SMBC	75,10	83,70	83,20
BTN	86,00	86,10	88,70
BPD Kalimantan Tengah	72,60	72,81	73,81
BSI	75,88	71,27	69,93

(Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Bank tahun 2022-2024, 2026)

Data pada Tabel 1.3 mengenai rasio BOPO pada tujuh bank penyalur KUR periode 2022–2024 menunjukkan variasi tingkat efisiensi operasional. Perbedaan kinerja ini memengaruhi kapasitas masing-masing bank untuk menjaga keberlanjutan program KUR. Secara umum, mayoritas bank sampel mencatatkan peningkatan rasio BOPO secara berkala, kecuali Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menunjukkan penurunan tren rasio. BPD Jawa Barat mencatatkan peningkatan BOPO yang relatif signifikan hingga melampaui angka 90% pada tahun 2024, yang mengindikasikan sebagian besar pendapatan operasional dialokasikan untuk menutup biaya operasional. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam manajemen biaya internal atau adanya ketidakseimbangan antara ekspansi distribusi KUR dengan pengendalian beban operasional bank. Sementara itu, Bank SMBC mengalami lonjakan rasio pada tahun 2023 dan tertahan pada rasio 83% di tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perubahan pada struktur biaya tetap atau beban operasional bank. Selanjutnya, Bank Tabungan Negara (BTN)

secara konsisten berada pada rasio BOPO di atas 86%, di mana tingginya rasio ini berpotensi menggerus margin keuntungan dari penyaluran KUR yang memiliki karakteristik margin tipis.

Sebaliknya, BSI mencatatkan penurunan rasio BOPO secara konsisten hingga di bawah 70%, yang mengindikasikan optimalisasi efisiensi pada operasional bank. Adapun bank regional lain seperti BPD DIY dan BPD Kalteng mengalami kenaikan BOPO yang lebih moderat, mengindikasikan pertumbuhan biaya operasional yang bergerak searah dengan peningkatan volume penyaluran kredit. Variasi kinerja BOPO ini relevan dengan Teori Intermediasi yang menekankan efisiensi sebagai parameter keberhasilan fungsi perantara bank. Selain itu, berdasarkan Teori Sinyal, rasio BOPO yang tinggi menjadi indikator bagi pasar mengenai adanya inefisiensi tata kelola operasional. Fenomena peningkatan BOPO pada mayoritas bank penyalur memberikan indikasi bahwa penyaluran kredit program bersubsidi dengan margin terbatas memerlukan pendekatan manajemen biaya yang lebih ketat. Oleh karena itu, analisis mengenai pola BOPO serta hubungannya dengan NPL dan volume distribusi KUR diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program penjaminan kredit ini. Tujuannya adalah untuk merumuskan model distribusi KUR yang tidak hanya memperluas jangkauan pembiayaan sektor UMKM, melainkan juga menjaga efisiensi operasional dan stabilitas manajemen risiko demi keberlanjutan kesehatan keuangan industri perbankan nasional.

Profitabilitas dalam industri perbankan diukur melalui berbagai indikator kinerja keuangan, di mana *Return On Assets* (ROA) menjadi salah satu parameter utama. Indikator ROA mengukur tingkat efektivitas manajemen bank dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh aset produktif yang dikelola untuk

menghasilkan laba bersih setelah pajak. Rasio ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi efisiensi operasional, kapabilitas tata kelola aset, serta potret tingkat kesehatan keuangan lembaga perbankan secara menyeluruh.

Tabel 1. 4
Perkembangan ROA Bank Penyalur KUR (%)

Bank Penyalur KUR	Tahun		
	2022	2023	2024
BPD Jawa Barat	1,75	1,29	0,86
BPD DIY	2,18	2,23	2,12
BPD Jawa Timur	1,95	1,87	1,60
SMBC	2,40	1,70	1,80
BTN	1,02	1,07	0,83
BPD Kalimantan Tengah	2,75	2,69	2,46
BSI	1,98	2,35	2,49

(Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Bank tahun 2022-2024, 2026)

Data ROA pada Tabel 1.4 menunjukkan tren penurunan pada mayoritas bank penyalur KUR periode 2022–2024. Penurunan rasio ROA pada bank seperti BPD Jawa Barat, BPD Jawa Timur, dan Bank BTN mengindikasikan adanya kendala dalam optimalisasi aset produktif untuk menghasilkan laba bersih. Berdasarkan Teori Sinyal, penurunan profitabilitas ini memberikan indikasi negatif kepada pasar mengenai penurunan efisiensi operasional dan kualitas aset bank. Rendahnya ROA pada BPD Jawa Barat dan Bank BTN pada tahun 2024 mencerminkan penyusutan margin laba yang dipicu oleh besarnya alokasi cadangan kerugian akibat peningkatan NPL serta pembengkakan BOPO. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspansi volume penyaluran KUR tidak selalu sejalan dengan peningkatan profitabilitas jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang efektif.

Kondisi berbeda terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mencatatkan pertumbuhan ROA secara konsisten hingga mencapai 2,49% pada tahun 2024. Tren

ini mengindikasikan bahwa perluasan penyaluran KUR dapat berjalan searah dengan peningkatan profitabilitas, dengan syarat bank mampu menjaga efisiensi biaya dan stabilitas kualitas kredit. Perbedaan kinerja antar bank sampel menegaskan bahwa faktor tata kelola internal dalam memitigasi dampak distribusi kredit program lebih menentukan tingkat perolehan laba dibandingkan faktor makroekonomi semata. Bank yang mengalami tren penurunan profitabilitas secara terus-menerus berpotensi menghadapi kendala penguatan modal serta penurunan daya saing di masa depan. Penurunan profitabilitas di tengah kewajiban penyaluran kredit program bersubsidi ini menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini. Pengujian secara empiris diperlukan untuk menganalisis apakah penurunan laba dipicu oleh fluktuasi NPL dan tingginya BOPO yang timbul dari proses distribusi KUR. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan manajemen perbankan agar penugasan penyaluran KUR tetap menjaga stabilitas fungsi intermediasi tanpa mengorbankan pemenuhan hak pemegang saham dan nasabah.

Dalam penyaluran KUR, korelasi antara volume kredit yang disalurkan dengan capaian ROA bank memiliki karakteristik yang dinamis. Dimana peningkatan penyaluran KUR yang dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan bunga bersih, yang pada gilirannya menaikkan kinerja ROA. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa bank dengan profitabilitas yang baik memiliki kapabilitas alokasi kredit yang efektif untuk menghasilkan pendapatan (Riadi, 2018). Namun, ekspansi kredit yang terlalu agresif pada segmen pelaku UMKM berpotensi meningkatkan risiko kredit yang berdampak pada lonjakan rasio NPL.

Hubungan kausal antara NPL dan ROA secara empiris terbukti bersifat negatif dan signifikan. Kredit bermasalah menyebabkan realisasi pendapatan bunga berada di bawah proyeksi, sehingga bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Pembentukan cadangan ini secara langsung mengurangi laba bersih bank dan menurunkan nilai ROA secara sistematis. Sebaliknya, optimalisasi posisi aset produktif serta penguatan kualitas kredit dengan meminimalkan rasio NPL menjadi strategi utama bank untuk meningkatkan nilai ROA (Puspitasari et al., 2021).

Tinjauan terhadap studi terdahulu mengenai hubungan antara perluasan kredit program, risiko, dan efisiensi terhadap profitabilitas bank menunjukkan hasil yang belum konsisten. Studi oleh Salesti (2020) dan Hasan (2019), memberikan bukti empiris bahwa distribusi KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, yang menegaskan keberhasilan fungsi intermediasi bank dalam mengonversi volume kredit menjadi pendapatan bunga. Namun, temuan tersebut berbeda dengan hasil riset Rini & Aristanto (2019) yang menyatakan KUR tidak memiliki dampak signifikan terhadap ROA. Lebih lanjut, Subianto et al. (2020) dan Pakaya et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi bank dalam program KUR tidak menciptakan perbedaan rata-rata yang signifikan pada nilai ROA, NPL, dan BOPO. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa hubungan antara penyaluran KUR dan profitabilitas masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Di sisi lain, pengujian terhadap faktor risiko internal dan efisiensi menghasilkan temuan yang lebih konsisten, di mana NPL dan BOPO secara terbukti menjadi penekan utama profitabilitas. Penelitian oleh Khoiriyah & Dailibas (2022) dan Putri et al. (2018) menyimpulkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan

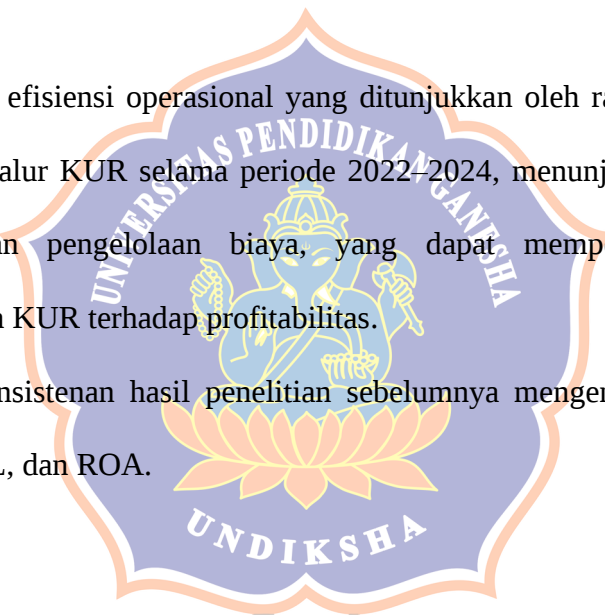
signifikan terhadap ROA. Temuan ini didukung oleh Teori Sinyal, di mana peningkatan NPL mencerminkan kendala pada manajemen risiko kredit yang memaksa bank menanggung kerugian aset. Demikian pula, rasio BOPO terbukti memiliki dampak negatif signifikan terhadap ROA, yang menegaskan pentingnya pengendalian biaya dalam optimalisasi laba Putri et al. (2018). Hasil penelitian Wiranegara & Riyadi (2019) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan KUR tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, penggabungan variabel KUR, NPL, dan BOPO sangat diperlukan untuk melihat faktor mana yang paling menentukan nilai ROA pada bank penyalur KUR.

Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut mendasari perlunya analisis lanjutan, khususnya dalam konteks perbankan di Indonesia sepanjang tahun 2022–2024. Periode tersebut merupakan fase normalisasi operasional pascapandemi COVID-19, di mana sektor perbankan dihadapkan pada tantangan penghentian kebijakan relaksasi kredit, tuntutan efisiensi biaya, serta pemulihan kapasitas bisnis sektor UMKM. Kondisi spesifik ini berpotensi memengaruhi pola interaksi antara volume distribusi KUR, risiko kredit (NPL), dan efisiensi biaya (BOPO) terhadap profitabilitas bank (ROA). Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menguji secara empiris hubungan antar-variabel tersebut pada fase penyesuaian pascakrisis yang dinamis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur manajemen keuangan perbankan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen bank dan pembuat kebijakan dalam merumuskan skema pembiayaan UMKM yang seimbang antara target pertumbuhan kredit, pengendalian risiko, dan pemenuhan efisiensi operasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mendasari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bukti empiris yang menguji dampak distribusi KUR terhadap profitabilitas bank penyalur masih terbatas, terutama pada periode 2022–2024.
2. Penyaluran KUR secara besar-besaran berpotensi meningkatkan risiko kredit yang tercermin dalam peningkatan NPL dan dapat secara langsung mengurangi ROA melalui penurunan pendapatan bunga dan peningkatan biaya cadangan kerugian.
3. Perbedaan efisiensi operasional yang ditunjukkan oleh rasio BOPO di bank-bank penyalur KUR selama periode 2022–2024, menunjukkan variasi dalam kemampuan pengelolaan biaya, yang dapat mempengaruhi kontribusi penyaluran KUR terhadap profitabilitas.
4. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara KUR, NPL, dan ROA.



1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membatasi analisis pada pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), *Non Performing Loan* (NPL), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia periode 2022-2024. Variabel penelitian dibatasi pada realisasi penyaluran KUR sebagai variabel independen pertama, NPL sebagai variabel independen kedua, BOPO sebagai variabel independen ketiga dan ROA

sebagai variabel dependen, tanpa memasukkan variabel lain seperti suku bunga, inflasi, atau faktor makroekonomi lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia?
3. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank penyalur KUR di Indonesia.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah di bidang akuntansi keuangan dan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penyaluran KUR, NPL, dan BOPO terhadap ROA pada bank penyalur KUR di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang relevan di masa mendatang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Penyalur KUR

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam menyeimbangkan strategi ekspansi kredit dengan pengelolaan risiko kredit bermasalah. Dengan memahami pengaruh NPL terhadap ROA, bank penyalur dapat menyusun kebijakan kredit yang lebih selektif, meningkatkan monitoring debitur, serta memperkuat manajemen risiko agar profitabilitas tetap terjaga.

b. Bagi Pemerintah dan Regulator Keuangan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program KUR dalam mendukung kinerja keuangan lembaga keuangan mikro, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembiayaan dan pengawasan kredit.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami hubungan antara pembiayaan produktif, risiko kredit, dan kinerja keuangan bank maupun non-bank.